BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum yang demokrasi dan memiliki moral Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana setiap masyarakatnya dituntut agar turut berperan dalam menjaga dan menegakkan hukum negara yang berkeadilan serta berketuhanan ini guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta berketuhanan dan taat hukum. Dan untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, seluruh profesi yang bergerak pada bidang hukum haruslah memiliki kesadaran dan tekad untuk selalu menegakkan hukum dimanapun berada, selalu berpola pikir kebenaran dan keadilan sebagai wujud dari rasa cinta, tanggung jawab, serta pengabdian terhadap Nusa, Bangsa dan Negara.

Dalam hal ini wewenang dari seorang yang berprofesi sebagai Notaris yaitu membuat Akta Otentik, yang berarti Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas sebagai pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris¹.

Sebagai seorang pejabat umum dan salah satu penegak dan pelaksana hukum, Notaris memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk turut serta menegakkan hukum sesuai dengan profesi dan atau jabatannya dengan turut

¹ Republik Indonesia, *UU No. 2 Tahun 2014*, perubahan dari UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No. 117

menyumbangkan tenaga, pikiran serta melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kejujuran, kebijaksanaan serta selalu mementingkan para pihak yang tanpa memihak siapapun dan selalu menjaga kerahasiaan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utamanya dari Notaris adalah membuat akta otentik.

Sebagai pedoman, Notaris dalam menjalankan tugas pekerjaannya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, Notaris wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Juga Kode Etik Notaris sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung tanggal 28 Januari 2005, ketentuan mana merupakan keharusan yang wajib ditaati oleh seorang Notaris. Bagi Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah peraturan mutlak dan sama sekali tidak boleh dilanggar karena merupakan *dwingen rechi* (hukum yang memaksa).²

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya.

²*Kode Etik Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa, Bandung 28 Januari 2005

Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.³

Akta adalah alat bukti terkuat dan terpenuh yang memilikibagian penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan di masyarakat. Baik dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dalam bidang perbankan, pertanahan, kegiatan yang bersifat sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat beriringan dengan semakin berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan sosial baik dalam bisnis yang melibatkan perusahaan besar, maupun secara perseorangan.

Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun pada kenyataannya dalam proses sengketa tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat membantu dalam penyelesaian perkara secara cepat dan efisien.

Akta otentik pada hakikatnyamemiliki kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan data bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para

³<https://wikipedia.web.id/diakses> 03 Januari 2018

pihak berdasarkan undang-undang jabatan notaris, yaitu dengan cara membacaknya sehingga isi Akta Notaris menjadi jelas, serta memberikan jalan terhadap informasi termasuk jalan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya isi Akta Notaris yang ditandatanganinya.

Akta Notaris merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :

- Syarat subyektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan perjanjian atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan capak bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum; dan
- Syarat obyektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang dilarang.

Dalam setiap perjanjian ada akibat hukum tertentu apabila syarat subyektif dan syarat obyektif tidak terpenuhi. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*nietig*) sepanjang ada permintaan dari orang-orang tertentu atau berkepentingan. Syarat subyektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan. Apabila ternyata dikemudian hari para pihak merasa ada hal yang melanggar syarat subyektif dan/atau tidak adanya kesepakatan yang mampu

mengikat para pihak, maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui gugatan yang akan diberikan putusan oleh Pengadilan. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum (nietig), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa perjalanan dianggap tidak pernah ada dan mengikat siapapun.

Akta Notaris yang telah dijadikan sebagai Akta di bawah tangan dan atau dibatalkannya Akta Notaris oleh Putusan Pengadilan, memberikan konsekuensi tanggung jawab yuridis bagi Notaris terhadap Akta yang dibatalkan tersebut. Hal ini bisa dimaklumi, karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan terhadap Akta tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak berhak menuntut kerugian.

Akta otentik yang dibuatkan oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan dan/atau ditetapkan oleh perundang-undangan, akan tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan dan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan tersebut.

Pentingnya peranan Notaris dalam menciptakan kepatutan dan kebenaran tidak terlepas dari kenyataan bahwa antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam melakukan hubungan hukum untuk membuat perjanjian memiliki keseimbangan kedudukan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya. Notaris yang diberikan hak dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta para pihak, diharapkan dapat menjadi arbitrase atas

kepentingan dari para pihak agar membuat perjanjian yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum. Posisi Notaris sangat penting dalam membantu dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Notaris berada dalam ranah pencegahan (preventif) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuat sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, kemudian apa yang terjadi apabila alat bukti yang paling sempurna kredibilitasnya tersebut masih dipertanyakan dalam unsur pembuktian?

Notaris di Indonesia bukanlah Notaris yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon yang hanya sekedar bertindak sebagai pengesahan perjanjian, seperti di Amerika. Tetapi notaris di Indonesia adalah Eropa Kontinental yang mempunyai wewenang memberikan legal advice dan memeriksa apakah perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat perjanjian yang benar dan tanpa merugikan salah satu pihak.

Perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas dan mampu bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya.

Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara harus dilaksanakan oleh setiap Notaris dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan kerugian-kerugian lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan, pengembangan dan pengawasan secara terus menerus sehingga semua Notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa Notaris membuat akta dalam hal sebagaimana telah diketahui didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik.

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan yakni tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang, yang mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat dijadikan alasan bagi pihak yang

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Berlainan halnya jika para pihak yang memberikan keterangan palsu dihadapan Notaris untuk dapat membuat suatu Akta Otentik demi keuntungan pribadi semata. Ketika permasalahan tersebut diajukan ke Pengadilan, maka para pihak terkena Pasal penipuan dan Notaris yang bersangkutan menjadi lalai karena tidak mengecek dokumen para pihak ataupun karyawan Notaris yang mengerjakan tanpa mengecek dan memberikan dokumen jadi untuk Notaris tandatangani. Namun dalam prakteknya, sering kali ditemui suatu Akta Notaris digugat untuk dimintakan pembatalan dimuka Pengadilan. Sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta yang dimintakan pembatalannya tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu sepakat yang mengikatkan diri para pihak dan kecakapan untuk membuat sesuatu, dalam hal ini pihak yang meminta pembatalan tersebut adalah pihak yang tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu atau pihak yang memberikan sepakatnya dalam suatu perjanjian secara tidak bebas.

Kondisi atas fakta yang ada dan terjadi di dalam masyarakat ditemukan kenyataan bahwa ada Akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain, sering kali Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan (medeplegger) atau membantu melakukan (medeplichtig) suatu tindak pidana

yaitu dianggap turut serta dan atau membantu membuat dengan memasukan atau memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik.

Dalam kejadian tersebut maka ada dua pokok yang menjadi pokok permasalahan yaitu tentang status Akta yang dibuat dan tanggung jawab Notaris atas Akta tersebut.

Terhadap pelanggaran Notaris, Majelis Pengawas Daerah/Majelis Pengawas Wilayah/Majelis Pengawas Pusat sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat melakukan pemeriksaan dan memutuskannya. Sedangkan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, seharusnya diperiksa dan diputus oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan uraian lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris. Dapat dikatakan demikian karena selain membuat Akta Otentik Notaris. Dapat dikatakan demikian karena selain membuat Akta Otentik Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan (lembaran Negara 1961-46 Juncto 43). Dalam prakteknya Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan kepada pihak-pihak yang membuat Akta kepada Notaris tersebut sehingga sulit memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris.

B. Perumusan Masalah

Dari masalah yang tertera dalam pembahasan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan dibahas dalam bab pembahasan berikutnya antara lain sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya keterangan palsu yang dilakukan oleh Penghadap
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Notaris yang telah diminta untuk mencatatkan keterangan sesuai permintaan palsu Penghadap
3. Apa akibat hukum bagi Notaris dan Penghadap yang telah memberikan keterangan palsu dalam Pembuktian di Pengadilan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya keterangan palsu yang dilakukan oleh Penghadap
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris yang telah diminta untuk mencatatkan keterangan sesuai permintaan palsu Penghadap
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum bagi Notaris dan Penghadap yang telah memberikan keterangan palsu dalam Pembuktian di Pengadilan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh Penulis yang dituangkan dalam bentuk tesis ini, adalah :

1. Secara teoritis,
 - guna menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya tentang peran Notaris/ PPAT dalam kasus pemalsuan keterangan dokumen pada akta otentik; dan
 - Menambah wawasan Penulis guna memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu kenotariatan, khususnya tentang tugas dan kewajiban Notaris dalam menerbitkan suatu Akta Otentik yang berdasarkan undang-undang.
2. Secara praktis,
 - Menjadi referensi untuk Notaris/PPAT sebagai praktisi hukum dan bisnis dalam menyikapi pemalsuan dokumen/keterangan palsu dalam pembuatan Akta-Akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran Notaris/PPAT, yang berdasarkan :
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
 - Kode Etik Notaris
2. Akta Otentik
 - Pengertian Akta Otentik;

- Syarat-syarat pembautan Akta Otentik;
 - Pembuatan dan penandatanganan Akta dihadapan Notaris;
3. Pemalsuan keterangan dokumen, yang dikenakan sanksi pidana, perdata atau administratif.

Konsepsi adalah pengembangan image untuk menterjemahkan suatu ide atau gagasan yang biasanya berbentuk kata. Perbedaan antara konsepsi dengan kata yang dipergunakan sehari-hari adalah bahwa konsepsi adalah lebih luas dari arti atau definisi dari sebuah kata. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut operational definition.

Dalam rangka penelitian ini, perlu disusun serangkaian definisi operasional (operational definition) dari beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu definisi operasional dari suatu tanggung jawab. Karena hal ini sangat diperlukan untuk menghindarkan salah pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendefinisikan arti tanggung jawab adalah sebagai : “keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya; umpan balik dari kewenangan yang telah diberikan untuk mempertanggung jawabkan sebagai pembebanan tugas dan pekerjaan.”

Tanggung jawab dalam Bahasa Inggris adalah responsibility sedangkan dalam Bahasa Latin adalah responsum (jawaban).alck Law Dictionary

mendefinisikan responsibility sebagai : *“The State of being answerable for an obligation and includes judgement, skill, ability and capacity”*

Terjemahan bebas dari definisi responsibility menurut Black’s Law Dictionary adalah : pernyataan atas jawaban untuk sebuah kewajiban dan termasuk dengan penilaian, keahlian, kemampuan dan kapasitas.

Agus : 2012 mengartikan tanggung jawab adalah :

“ Suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, negara dan Tuhan ”.

Dalam kacamata filsafat, konsep tanggung jawab berdasarkan ide-ide sebagai berikut :

- a. Kewajiban
- b. Terdapat tindakan-tindakan yang harus dan dapat dijalankan oleh suatu makhluk sosial;
- c. Liabilitas/imputabilitas (kemungkinan untuk digugat)

Kelalaian seseorang terhadap tindakan-tindakan ini dapat dikenakan hukuman;

- d. Ketaatan

Ketaatan seseorang terhadap tindakan ini berkaitan dengan ganjaran (penghargaan, pujian).

Ketga ide diatas didasarkan pada pandangan bahwa:

- a. Motif-motif manusia merupakan sebab perilaku;

- b. Motif-motif itu dapat dikondisikan (dikontrol, dipengaruhi, disesuaikan oleh hal-hal seperti ganjaran dan hukuman; dan mungkin);
- c. Motif-motif ini harus dan layak dikondisikan.

Tanggung jawab adalah konsekuensi atas kehendak bebas manusia dan imputabilitas (ketergantungan) yang berdasarkan kehendak bebas. Karena imputabilitas ini pribadi moral selaku sebab penentu perbuatannya yang baik dan jahat, harus memberikan jawaban terhadap perbuatan tersebut dihadapan suara hatinya sendiri; dihadapan penilai (putusan) moral orang-orang lain; dan khususnya Ilahi. Pihak tersebut juga harus menerima konsekuensi dari tindakannya yang tidak bisa dielakkan, yang memikul tanggung jawab adalah pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab ialah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi yang bertolak dari bagian manusia yang rohani kehendak bebas.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai tanggung jawab diatas, tanggung jawab profesi Notaris berdasarkan kode etik pada hakikatnya merupakan tanggung jawab yang lebih bersifat moral dan penegakkannya terbatas pada organisasi profesi bersangkutan.

Dalam Bab VI tentang Sanksi dalam Kode Etik Notaris yang tercantum antara lain berupa :

Pasal 6 :

1. Teguran;
2. Peringatan;

3. Schorsing (pemecatan sementara) dari anggota Perkumpulan;
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pasal 7 :

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

F. Metode Penelitian

Data yang didapatkan dan dikumpulkan secara keseluruhan akan dilakukan pembahasan dan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini merupakan metode yuridis normatif, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab para pihak yang terbukti telah memalsukan dokumen untuk pembuatan Akta Notaris. Dan juga bersifat deskriptif, yang diartikan sebagai suatu tipe penelitian yang memberi gambaran secara utuh dan lengkap tentang suatu proses yang menjadi unit analisis dengan sasaran yang hendak dicapai adalah telah secara sistematis tentang tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta yang dibuatnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian deskriptif memberikan peluang dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara utuh dan menyeluruh proses yang hendak diwujudkan dalam menjawab asumsi atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulis didukung oleh metode penelitian yang baik untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

1. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang secara umum mencangkup penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan hukum konkrit dan system hukum. Cakupan penelitian hukum normatif akan terlihat dari analisis putusan hakim yang telah ada dan kemudian akan dijabarkan sesuai dengan sasaran pokok dalam penelitian hukum normatif.

Pendekatan Yuridis Normatif yang antara lain dicirikan adanya pemahaman data sekunder, bila dikaitkan dengan pokok-pokok bahasan yang tertuang dalam tujuan penelitian, pendekatan Yuridis Normatif menjadi penting untuk dikedepankan. Selanjutnya pendekatan itu diarahkan pada upaya pemahaman bahan-bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-Undangan,

kode etik Notaris dan putusan-putusan pengadilan yang menyangkut tanggung jawab yang dipandang perlu dengan praktek pembatalan akta Notaris, khususnya Pada salah satu Putusan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus.

2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian kepustakaan ditinjau dari sasarannya dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yakni :

a. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Kode Etik Notaris;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Kompilasi Hukum.

b. Bahan hukum sekunder;

Bahan hukum sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer, terdiri atas :

1. Berbagai kepustakaan mengenai Notaris dan Aktanya;
2. Berbagai hasil penelitian mengenai Notaris dan Aktanya;
3. Berbagai hasil kongres, kesimpulan seminar mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Aktanya.

c. Bahan hukum tersier .

Bahan hukum tersier, terdiri atas :

- Kamus hukum;
- Jurnal;
- Website; dan lainnya

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian yang bersifat kualitatif, artinya penelitian tidak hanya memberikan suatu gambaran dan analisa obyek yang menajadi masalah tersebut yaitu tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Akta yang dibuatnya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

4. Metode Penyajian Data

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka setelah data yang diperlukan, baik bahan hukum primer maupun sekunder terkumpul, data tersebut digabungkan untuk kemudian dilakukan proses pengolahan data.

Hasil penelitian tersebut, secara keseluruhan akan disusun dan disajikan dalam suatu laporan tertulis ilmiah yaitu dalam bentuk tesis, diikuti dengan pengambilan kesimpulan tertentu atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

5. Metode Analisa Yang Digunakan

Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara keseluruhan akan dibahas atau dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta yang dibuatnya.

G.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab dibagi lebih lanjut menjadi sub-sub bab dengan maksud agar lebih jelas dan mudah dipahami.

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang berisi mengenai pendahuluan ini dibagi menjadi enam sub bab, yaitu terkait masalah : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti, yaitu tentang Notaris dan PPAT, berisi tiga sub bab, pertama mengenai Tinjauan tentang Notaris dan PPAT, kedua Tinjauan pemalsuan keterangan menurut Islam, ketiga Tinjauan atas dokumen Akta Otentik. Sehingga BAB II ini akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan sebagaimana telah disebutkan dalam BAB I.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga ini akan disajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan, yang telah dianalisis. Pembahasan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab sebelumnya. sistematika penyajian data dan pembahasan sesuai dengan identifikasi yang ada baik dari mulai pembahasan awal hingga mengenai Teori Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila dan Agama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Simpulan dan Saran